



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KAMALUDIN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **757797**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.575.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah Seluas 9.304 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, Rp. 90.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/100 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
8. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 237.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2 TP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	150.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.325.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.287.000.000
III. HUTANG	Rp.	100
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.286.999.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.